

This thesis investigates the political and bureaucratic barriers to the implementation of large scale solar panels in Indonesia's energy landscape. Despite Indonesia's significant renewable energy potential, the contribution of solar PV to the national grid remains minimal. Through a qualitative analysis involving interviews with key stakeholders and a comprehensive review of relevant literature, this study identifies critical challenges such as regulatory complexity, lack of transparency, and insufficient stakeholder engagement. The findings highlight the need for streamlined policies, enhanced public-private partnerships, and increased transparency to facilitate the transition to renewable energy. The study also offers comparative insights from other countries, providing a roadmap for overcoming these barriers and achieving Indonesia's sustainability goals. The study utilizes Institutional Theory to analyse the political and bureaucratic barriers to solar energy implementation. This framework helps to understand how various institutions influence organizational behaviour and decision-making processes.

Abstrak

Tesis ini menyelidiki hambatan politik dan birokrasi dalam implementasi panel surya skala besar di lanskap energi Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang signifikan, kontribusi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terhadap jaringan listrik nasional masih minimal. Melalui analisis kualitatif yang melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan utama dan tinjauan menyeluruh terhadap literatur yang relevan, studi ini mengidentifikasi tantangan kritis seperti kompleksitas regulasi, kurangnya transparansi, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang tidak memadai. Temuan ini menekankan perlunya kebijakan yang lebih efisien, peningkatan kemitraan publik-swasta, dan peningkatan transparansi untuk memfasilitasi transisi ke energi terbarukan. Studi ini juga menawarkan wawasan komparatif dari negara-negara lain, menyediakan peta jalan untuk mengatasi hambatan ini dan mencapai tujuan keberlanjutan Indonesia. Studi ini menggunakan Teori Institusional untuk menganalisis hambatan politik dan birokrasi dalam implementasi energi surya. Kerangka ini membantu memahami bagaimana berbagai institusi mempengaruhi perilaku organisasi dan proses pengambilan keputusan.